

RENCANA KERJA



TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL
KOTA BEKASI



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pemerintah Kota Bekasi untuk Periode 2018-2023 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), didalamnya memuat Visi "Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan". Kota Bekasi memiliki Misi yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdayasaing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi menjalankan Misi pertama yaitu "Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" dari 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023. RPJM Pemerintah Kota Bekasi 2018 - 2023 dijadikan landasan Operasional Pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi dalam penyusunan Rencana Strategis untuk dokumen perencanaan periode lima tahunan, yang dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu dari unsur perangkat daerah Pemerintah Kota Bekasi yang melaksanakan urusan di bidang administrasi kependudukan sebagai bagian dari pelaksana pelayanan dasar kepada masyarakat, maka dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 yang dimulai dari proses evaluasi capaian kinerja tahun 2018 dan dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD 2020 Pemerintah Kota Bekasi, maka disusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2020 yang berisi Program dan Kegiatan Prioritas untuk mewujudkan capaian kinerja Rencana strategik Tahun 2018 - 2023.



1.1. LATAR BELAKANG

Disusunnya rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2020, untuk menetapkan perencanaan pembangunan tahunan yang berisi program, kegiatan dan penganggaran sebagai penjabaran dari upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Selain pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA juga terdapat capaian cakupan target pelayanan adminduk yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri antara lain:

- a. Cakupan kepemilikan kartu keluarga;
- b. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran;
- c. Cakupan Penerbitan KTP-el;
- d. Cakupan Kepemilikan akta Perkawinan;
- e. Cakupan Penerbitan Akta Kematian.

Dalam upaya peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan pelayanan berbasis Teknologi Informasi untuk memenuhi kemudahan layanan dengan mempersingkat birokrasi, serta memberikan layanan pemanfaatan data base kependudukan kepada lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditunjang melalui peningkatan kapasitas Aparatur, penataan sarana dan prasarana, dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dan SOP tentang Administrasi Kependudukan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Daerah Tahun 2017;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2019;
 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi;



14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 03 Seri E).
15. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

2.3. MAKSUD DAN TUJUAN

2.3.1. Maksud

Landasan penyusunan rencana kegiatan dan belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020.

2.3.2. Tujuan

- a. Memberikan acuan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020;
- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- c. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

2.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
2. Bab 2 (dua) menggambarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal PD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.



3. Bab 3 (tiga) adalah Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan. Bab ini menggambarkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD Dan Program dan Kegiatan, Isu-isu Strategis.
4. Bab 4 (empat) berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yaitu berisi usulan program dan Kegiatan
5. Bab 5 (lima) berisi penutup yaitu Pencatatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI

TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Kota Bekasi tahun 2018 (n-2) ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah, merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan renja Disdukcapil Kota Bekasi tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra tahun 2015 belum dapat dilakukan karena sebagai Perangkat Daerah Disdukcapil Kota Bekasi baru terbentuk pada tahun 2018 melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Serta sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam



melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 5 program dan 26 kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2017 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra s/d realisasi Tahun 2018 sebagaimana yang tertera pada Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2018.

Tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018
Kota Bekasi

Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4+6+8)	10=(9/3)
1 Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Warehouse, Website dan Pemindahan Data Kependudukan dan Catatan Sipil	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang bermanfaat dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 Peningkatan Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil	Semua Siswa Sekolah Menengah memiliki Akta Kelahiran	60 Orang	100%	-	-	-	-	-	-
4 Peningkatan Kapasitas Operator dan Registrator	Meningkatnya Kapasitas Operator dan Registrator	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIAK dan Arsip Digital	Meningkatnya Kemampuan sarana sistem informasi dan pengelola administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6 Pelaksanaan Kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KTP-el)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan KTP-el	100%	100%	-	-	-	-	-	-
7 Validasi Data Kependudukan	Meningkatnya data penduduk yang di validasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8 Penataan Dokumentasi Akta-Akta Catatan Sipil	Tercapatnya Penataan Arsip Akta-akta Catatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya hasil kebijakan dalam pelayanan tertib administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10 Pengadaan Card Reader dan Printer KTP-el	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencetakan KTP-el	100%	100%	-	-	-	-	-	-



Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016			Capaian Target Renstra PD 3-10 tahun berjalan		
				Target Renja PD tahun 2016	Realisasi Renja PD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2016)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2016)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4+6+8)	10=(9/3)
11 Sosialisasi Administrasi Kependudukan	d. Kecamatan Meningkatkan pemahaman dan masyarakat terhadap lemb administrasi kependudukan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12 Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Anak-anak Panti Asuhan, Anak Terlantar dan Anak Jalanan	Tercapainya Pelayanan Akta Kelahiran bagi Anak-anak Panti Asuhan, Anak Terlantar dan Anak Jalanan		100%	100%	100%	100%			
13 Penyusunan Penerbitan Buku Induk Kependudukan	Tersedianya Data Buku yang Otentik		100%	-	-	-			
14 Penyelenggaraan Pelayanan Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Kematian Berbasis Web	Tercapainya data akta perkawinan, akta kelahiran, akta kematian berbasis web kepada pemohon		-	100%	100%	100%			
15 Pelayanan Keliling Dokumen Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16 Pelayanan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara)	Tercapainya Kartu SKTS bagi penduduk non permanen dan Pemberian Kartu Sehat bagi masyarakat kurang mampu di Kota Bekasi		-	100%	100%	100%			
17 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan Keluarga	Terwujudnya Kelancaran pelayanan di bidang administrasi kependudukan Tersedianya Blanks KK		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18 Pengadaan Blanks Kartu Keluarga	Tersedianya bahan penerbitan KTP-el Tahun 2017		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19 Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	Tersedianya database akta kelahiran se Kota Bekasi		-	100%	100%	100%			
20 Pembentukan Tim Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Thn	Tersedianya Blanks KTP-el		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21 Penataan Dokumen dan Arsip Kependudukan dan Catatan Sipil	Tersedianya Blanks KTP-el		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Laku 2018			Target program dan kegiatan (Penja PD tahun 2019)	Pertemuan Realisasi: Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
				Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7 = (5/6) 100%	8	9 = (4+6+d) 100%	10=(9/2) 100%	
22 Peningkatan Sarana dan Prasarana E-KTP	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang E-KTP	100%	100%	100%	100%	100%				
23 Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan Kota Bekasi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Data Kependudukan										
1 Pemanfaatan Data Kependudukan	Terseleksiannya Bimtek Pemanfaatan Data Kependudukan	100%								
2 Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan, Struktur Umur Tunggal dan Data Agregat Kependudukan	100%								
3 Pengembangan dan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Kependudukan (SIMPADUK)	Terpeliharanya dan meningkatnya kapasitas jaringan SIMPADUK	100%								
Program Pendaftaran Penduduk										
1 Pengadaan Blanko Kartu Keluarga, KIA dan Pencetakan KS	Terseleksiannya Pelayanan Adminduk yang Optimal	100%								
2 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Terseleksiannya Pelayanan Luar kantor	100%								
3 Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	Terseleksiannya Pelayanan Adminduk yang optimal	100%								
4 Sertifikat Bimtek dan Koordinasi ke Pusat/Prov/Kota	Meningkatnya pelayanan Adminduk kependudukan	100%								
5 Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film (DAK Non Fisik)										

A. Program/Kegiatan yang memenuhi, tidak memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluarga

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan :

1. Penataan Dokumentasi Administrasi Kependudukan
2. Peningkatan Kepemilikan Akta Perkawinan
3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse Kependudukan
4. Peningkatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran
5. Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK)
6. Pelayanan Keliling Catatan Sipil (DAK)
7. Sinergitas ke Tingkat Pusat dan Provinsi serta Pembinaan Teknis Administrasi Kependudukan (DAK)

b. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan :

1. Pengadaan Blanko Kartu Keluarga dan pencetakan kartu sehat
2. Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan
3. Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film
4. Pengadaan Map dan Box File Administrasi Kependudukan
5. Sosialisasi Administrasi Kependudukan (DAK)
6. Pembentukan Tim Lintas Sektor (DAK)
7. Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih (Cleaning Set) (DAK)
8. Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk (DAK)
9. Pengadaan Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil (DAK)
10. Pemeliharaan Perangkat SIAK dan Pengadaan Kartu SAM (Secure Acces Modul) (DAK)
11. Pengelolaan Data Kependudukan (DAK)
12. Penyusunan Data Penduduk Per Semester (DAK)
13. Pemanfaatan Data Kependudukan (DAK)
14. Sinergitas Dalam Rangka Rakernas Disdukcapil (DAK)
15. Pengembangan, Pemeliharaan dan Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Kependudukan (SIMPADUK)
16. Penyusunan Profil Kependudukan (DAK)

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan : NIHIL

B. Faktor-faktor, Implikasi yang timbul dan Kebijakan/Tindakan yang diambil

a. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya pada realisasi program/kegiatan

1. Keterbatasan anggaran
2. Rasionalisasi anggaran
3. Sedikitnya undangan Bimbingan Teknis
4. Kurangnya waktu pelaksanaan

b. Implikasi yang timbul terhadap target kinerja hasil/keluaran

1. Perencanaan yang sudah disusun tidak berjalan sesuai yang diharapkan
2. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan

c. Kebijakan/Tindakan yang harus diambil

1. Kegiatan tidak dilaksanakan semua dikarenakan keterbatasan anggaran atau sedikitnya peserta bimbingan teknis
2. Dibutuhkan perencanaan yang lebih matang dan terukur



LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2018
TRIWULAN IV
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan Rp	%
2.06.2.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan								
2.06.2.06.01.15.01	Pengadaan Blanko Kartu Keluarga dan pencetakan kartu sehat	5.720.000.000,00	5.421.400.000,00	100,00%	5.421.400.000,00	100,00%	21,37%	5.082.335.000,00	93,75%
2.06.2.06.01.15.02	Penataan Dokumentasi Administrasi Kependudukan	250.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	30,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.06.2.06.01.15.04	Penyenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	400.000.000,00	300.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	1,18%	290.310.000,00	96,77%
2.06.2.06.01.15.05	Peningkatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	20,00%	0,16%	14.100.000,00	7,05%
2.06.2.06.01.15.06	Peningkatan Kepemilikan Akta Perkawinan	150.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.06.2.06.01.15.07	Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse Kependudukan	200.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	30,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.06.2.06.01.15.08	Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	2.100.000.000,00	4.102.500.000,00	100,00%	4.102.500.000,00	100,00%	16,17%	3.571.670.000,00	89,50%
2.06.2.06.01.15.09	Pengadaan Map dan Box File Administrasi Kependudukan	500.000.000,00	300.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	1,18%	282.215.076,00	94,07%
2.06.2.06.01.15.11	Pengembangan, Pemeliharaan dan Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Kependudukan (SIMPADUK)	2.500.000.000,00	300.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%

2.06.2.06.01.15.19	Sosialisasi Administrasi Kependudukan (DAK)	- 200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	0,79%	184.480.000,00	92,24%
2.06.2.06.01.15.17	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	0,75%	18.000.000,00	9,00%
2.06.2.06.01.15.18	Pelayanan Keliling Catatan Sipil (DAK)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	0,63%	87.000.000,00	43,50%
2.06.2.06.01.15.19	Pembentukan Tim Lintas Sektor (DAK)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	0,39%	37.287.000,00	37,29%
2.06.2.06.01.15.20	Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih (Cleaning Set) (DAK)	1.254.450.000,00	1.254.450.000,00	100,00%	1.254.450.000,00	100,00%	4,54%	1.100.716.000,00	87,74%
2.06.2.06.01.15.21	Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk (DAK)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	500.000.000,00	100,00%	1,97%	442.478.000,00	88,50%
2.06.2.06.01.15.22	Pengadaan Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil (DAK)	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%	400.000.000,00	100,00%	1,58%	335.324.000,00	83,83%
2.06.2.06.01.15.23	Pemeliharaan Perangkat SLAK dan Pengadaan Kartu SAM (Secure Access Modul) (DAK)	805.000.000,00	805.000.000,00	100,00%	805.000.000,00	100,00%	3,17%	764.400.000,00	94,96%
2.06.2.06.01.15.24	Pengelolaan Data Kependudukan (DAK)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	0,79%	77.313.000,00	38,66%
2.06.2.06.01.15.25	Penyusunan Data Penduduk Per Semester (DAK)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	0,79%	183.065.000,00	91,53%
2.06.2.06.01.15.26	Penyusunan Profil Kependudukan (DAK)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	0,63%	127.984.000,00	63,99%
2.06.2.06.01.15.27	Pemanfaatan Data Kependudukan (DAK)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	0,79%	181.776.000,00	90,89%
2.06.2.06.01.15.28	Sinergitas Dalam Rangka Rakernas Disdukcapil (DAK)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%	0,20%	49.479.942,00	98,96%
2.06.2.06.01.15.29	Sinergitas ke Tingkat Pusat dan Provinsi serta Pembinaan Teknis Administrasi Kependudukan (DAK)	166.584.000,00	166.584.000,00	100,00%	166.584.000,00	100,00%	0,20%	28.400.000,00	17,05%

2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00%	450.000.000,00	100,00%	1,77%	441.172.623,00	98,04%			
2.06.2.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000,00	195.000.000,00	100,00%	195.000.000,00	100,00%	0,73%	158.288.256,00	85,56%			
2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	400.000.000,00	311.000.000,00	100,00%	311.000.000,00	100,00%	1,23%	306.416.100,00	99,53%			
2.06.2.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%	75.000.000,00	100,00%	0,30%	72.987.400,00	97,32%			
2.06.2.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	80,00%	0,05%	8.250.000,00	55,00%			
2.06.2.06.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000,00	54.400.000,00	100,00%	54.400.000,00	100,00%	0,21%	54.382.000,00	99,97%			
2.06.2.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	150.000.000,00	80.000.000,00	100,00%	80.000.000,00	75,00%	0,24%	40.038.500,00	50,05%			
2.06.2.06.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	478.567.000,00	154.802.500,00	100,00%	154.802.500,00	61,00%	0,37%	54.802.500,00	35,40%			
2.06.2.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	6.394.725.000,00	7.789.525.000,00	100,00%	7.789.525.000,00	100,00%	30,70%	7.605.175.000,00	97,64%			
2.06.2.06.01.01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	0,39%	94.600.000,00	94,60%			
2.06.2.06.01.01.31	Penataan Arsip	45.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%			
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
2.06.2.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%	250.000.000,00	70,00%	0,69%	166.551.000,00	66,62%			
2.06.2.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	270.000.000,00	259.600.000,00	100,00%	259.600.000,00	90,00%	0,92%	190.804.304,00	73,50%			

2.06.2.06.01.02.28	Penyediaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	75.000.000,00	110.000.000,00	100,00%	110.000.000,00	90,00%	0,39%	43.838.000,00	39,85%
2.06.2.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
2.06.2.06.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	180.000.000,00	176.000.000,00	100,00%	176.000.000,00	100,00%	0,69%	176.000.000,00	100,00%
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
2.06.2.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.06.2.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
2.06.2.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	70,00%	0,08%	17.763.000,00	59,21%
2.06.2.06.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan	30.000.000,00	20.500.000,00	100,00%	20.500.000,00	70,00%	0,06%	10.462.000,00	51,03%
2.06.2.06.01.06.06	Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	50,00%	0,02%	1.250.000,00	12,50%
		26.959.326.000,00	25.370.761.500,00	100,00%	25.370.761.500,00		96,52%	22.401.313.701,00	88,30%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa indikator antara lain Cakupan Database Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan, Cakupan Penerbitan KK, Cakupan Penerbitan KTP, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Akta Kematian dan Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi PD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan PD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 23 Th 2006, PP Nomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor 25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus - menerus, antara lain melalui:
 - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK
 - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi

3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll)
6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8. Terbatasnya kewenangan yang tercantum pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di mana kewenangan Dinas Dukcapil Kota Bekasi hanya pada penyusunan Profil perkembangan kependudukan daerah
9. Akurasi data kependudukan di Kota Bekasi yang masih harus ditingkatkan, masih cukup tinggi jumlah Data Ganda dan Data Anomali yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi peluang dan tantangan.

a. Faktor Kekuatan Organisasi:

1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sehingga menegaskan kewenangan Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan;
2. Landasan hukum penyelenggaraan Administrasi Kependudukan :
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi;
4. Implementasi Standar Manajemen Mutu;
5. Adanya motivasi belajar aparatur yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi :

1. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana; Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan kecukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.

c. Faktor Peluang Organisasi :

1. Adanya penerapan nyata Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016; Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Profesional dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berbasis Teknologi Informasi
2. Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan sistem. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersebut.

d. Faktor Tantangan Organisasi :

1. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima; Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan

publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sebuah hal yang harus dilakukan;

3. Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.

Review terhadap Sancangan Awal RKPD Tahun 2020 - Kota Bekasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Data Kependudukan Pencetakan Data Kependudukan	Kota Bekasi	Jumlah BIMTEK Pemanfaatan Data Kependudukan yang terseleenggara	100%	250 000 000	Pengadaan Blanko KK dan Pencetakan Kartu Sehat	Kota Bekasi	Jumlah BIMTEK Pemanfaatan Data Kependudukan yang terseleenggara	100%	250 000 000	
2	Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Bekasi	1. Jumlah Buku Profil Kependudukan, 2. Jumlah Buku Struktur Umur Tunggal 3. Jumlah Buku Data Agregat Kependudukan	1 Dokumen	250 000 000	Penataan Dokumentasi Administrasi Kependudukan	Kota Bekasi	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan, Buku Struktur Umur Tunggal dan Buku Data Agregat Kependudukan	1 Dokumen	250 000 000	
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Kependudukan (SIMPADUK)	Kota Bekasi	Terpeliharanya dan Meningkatnya Kapasitas Jaringan SIMPADUK	100%	2 000 000 000	Penyenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Kota Bekasi	Terpeliharanya dan Meningkatnya Kapasitas Jaringan SIMPADUK	100%	2 000 000 000	
1	Pengadaan Blanko Kartu Keluarga, KIA dan Pencetakan Kartu Sehat	Kota Bekasi	Terselenggaranya Pelayanan Amnduk yang Optimal	100%	4 760 000 000	Peningkatan Kepemilikan Akta Perkawinan	Kota Bekasi	Terselenggaranya Pelayanan Amnduk yang Optimal	100%	4 760 000 000	
2	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Kota Bekasi	Terselenggaranya Pelayanan Luar Kantor	100%	100 000 000	Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse Kependudukan	Kota Bekasi	Terselenggaranya Pelayanan Luar Kantor	100%	100 000 000	
3	Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	Kota Bekasi	Terselenggaranya Pelayanan Amnduk yang Optimal	100%	3 782 000 000	Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	Kota Bekasi	Terselenggaranya Pelayanan Amnduk yang Optimal	150%	3 782 000 000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2020, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Disdukcapil Kota Bekasi.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan lembaga dan asosiasi-asosiasi penyiaran. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan masukan dari asosiasi-asosiasi penyiaran dan aspirasi masyarakat dalam Forum Disdukcapil yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin yang salah satu sasaran kegiatannya adalah Kecamatan se- Kota Bekasi, yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Data Kependudukan.

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2020 Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN DISDUKCAPIL****3.5 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2019-2035. Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah "Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan". Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah "meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan". Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja Disdukcapil Tahun 2019 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi

Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DISDUKCAPIL

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan PD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah (PD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2020 sebanyak 8 Program dan 37 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Data Kependudukan
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 37 kegiatan sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	NILAI PAGU
A	BELANJA LANGSUNG URUSAN	14.682.000.000
	PROGRAM DATA KEPENDUDUKAN	2.500.000.000
1	Pemanfaatan Data Kependudukan	250.000.000
2	Penyusunan Profil Kependudukan	250.000.000
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Kependudukan	2.000.000.000
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	11.132.000.000
1	Pengadaan Blanko kartu Keluarga, KIA dan Pencetakan Kartu Sehat	4.700.000.000
2	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	100.000.000
3	Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	3.782.000.000
4	Sinergitas Bimtek dan Koordinasi ke Pusat/Provinsi/Kota	150.000.000
5	Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	2.050.000.000
6	Pengelolaan Data Kependudukan	150.000.000
7	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	200.000.000

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	NILAI PAGU
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.050.000.000
1	Pengadaan Blanko, Register dan Formulir Pencatatan Sipil	400.000.000
2	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	100.000.000
3	Pengadaan Map Administrasi Kependudukan	350.000.000
4	Peningkatan Pelayanan Kelahiran	200.000.000
B	BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN	12.010.100.000
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.655.100.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
2	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250.000.000
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000
5	Penyebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	150.000.000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	100.000.000
10	Perubahan PERDA KOTA BEKASI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Bekasi	50.000.000
11	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	8.040.100.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.685.000.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	100.000.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	300.000.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	285.000.000
4	Renovasi Gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi	1.000.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	425.000.000
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	200.000.000
2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	225.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	200.000.000
1	Sinergitas Rakornas (DAK)	100.000.000
2	Pendidikan Pelatihan Formal dan Informal	100.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	45.000.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	15.000.000

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	NILAI PAGU
	Kinerja SKPD	
2	Penyusunan laporan Keuangan	15.000.000
3	Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM	15.000.000
	JUMLAH	26.692.100.000

➤ Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah melaksanakan Visi dan Misi 1 Wali Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik meliputi melaksanakan pelayanan pada Mall Pelayanan Publik yang tersedia pada 3 titik layanan, meningkatkan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya dan mengembargan layanan publik berbasis IT.

2. Pencapaian SDGs

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan program/kegiatan berkelanjutan (SDGs) antara lain adalah Pemutakhiran Data Kependudukan, Menjalin kerjasama antara Dinas terkait/instansi vertikal lainnya dalam hal pemanfaatan data kependudukan yang berbasis NIK.

3. Pencapaian NSPK/SPM

Tabel

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dukcapil sebagaimana tercantum dalam SPM Kota Bekasi

NO	Layanan	Indikator SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Pencatatan Analisis
				2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan Penerbitan KK	Cakupan Penerbitan KK		86,32%	82,29%	85,45%	88,74%	100%	100%	100%	
	Cakupan Penerbitan KTP	Cakupan Penerbitan KTP		71,16%	81,02%	85,87%	93,01%	76,08%	86,22%	91,28%	
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran		79,24%	82,29%	85,87%	93,01%	87,27%	100%	90,70%	
	Cakupan Penerbitan Kutipan Kematian	Cakupan Penerbitan Kutipan Kematian		67,01%	70,38%	72,79%	74,16%	11,19%	58,62%	63,93%	
	Cakupan Penerbitan Kutipan Perkawinan	Cakupan Penerbitan Kutipan Perkawinan		25,98%	31,46%	38,10%	46,17%	68,14%	70,06%	75,45%	

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA BEKASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Data Kependudukan								
1	Pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggaranya BIMTEK Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Bekasi	100%	250.000.000	DAK NON FISIK		100%	250.000.000
2	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan, Buku Struktur Umur Tunggal dan Buku Data Agregat Kependudukan	Kota Bekasi	1 Dokumen	250.000.000	DAK NON FISIK		1 Dokumen	250.000.000
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Kependudukan (SIMPADUK)	Terpeliharanya dan Meningkatnya Kapasitas Jaringan SIMPADUK	Kota Bekasi	100%	2.000.000.000	APBD		100%	2.000.000.000
	Program Pendaftaran Penduduk								
1	Pengadaan Blanko Kartu Keluarga, KIA dan Pencetakan Kartu Sehat	Terselenggaranya Pelayanan Admuduk yang Optimal	Kota Bekasi	100%	4.700.000.000	APBD		100%	4.700.000.000
2	Pelayanan Kelling Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Pelayanan Luar Kantor	Kota Bekasi	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
3	Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	Terselenggaranya Pelayanan Admuduk yang Optimal	Kota Bekasi	100%	3.782.000.000	APBD		100%	3.782.000.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
4	Sinergitas Bimtek dan Koordinasi ke Pusat/Provinsi/Kota	Meningkatnya pelayanan Administrasi kependudukan	Kota Bekasi	100%	150.000.000	DAK NON FISIK		100%	150.000.000
5	Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	Terselenggaranya Pelayanan Adminduk yang Optimal	Kota Bekasi	100%	2.050.000.000	DAK NON FISIK		100%	2.050.000.000
6	Pengelolaan Data Kependudukan	Tersedianya Data yang Valid	Kota Bekasi	100%	150.000.000	DAK NON FISIK		100%	150.000.000
7	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Sosialisasi Adminduk	Kota Bekasi	100%	200.000.000	DAK NON FISIK		100%	200.000.000
	Program Pencatatan Sipil								
1	Pengadaan Blanko, Register dan Formulir Pencatatan Sipil	Tersedianya Blanko, Register dan Formulir Pencatatan Sipil	Kota Bekasi	100%	400.000.000	DAK NON FISIK		100%	400.000.000
2	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil Luar kantor	Kota Bekasi	100%	100.000.000	DAK NON FISIK		100%	100.000.000
3	Pengadaan Map Administrasi Kependudukan	Tersedianya Map Administrasi Kependudukan	Kota Bekasi	100%	350.000.000	APBD		100%	350.000.000
4	Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran	Meningkatnya Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Thn	Kota Bekasi	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2020 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2020 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2020 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 27 Seri E). Dari kaidah-kaidah hukum dimaksud penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bekasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahunan sangat bergantung pada komitmen seluruh aparaturnya, konsistensi sangat diperlukan, capaian cakupan yang telah dilakukan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam merencanakan Rencana Kerja di periode selanjutnya.

Pelaksanaan rencana kerja saat ini diharapkan mampu mendorong untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di periode selanjutnya.

Demikian rencana kerja ini disusun sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Bekasi, 29 Juli 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI



TAUFIQ R HIDAYAT, AP, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19751001 199311 1 002